

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK BAGI HASIL

Sugeng Susilo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan kontrak bagi hasil dan implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan kandungan minyak dan gas bumi yang berlimpah namun belum dikelola dengan baik. Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai landasan hukum pengelolaan minyak dan gas bumi sudah beberapa kali di Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sistem kontrak yang bertentangan dengan konstitusi karena dengan sistem kontrak akan mendegradasikan penguasaan negara terhadap kekayaan alam sehingga sistem kontrak bagi hasil dalam pengelolaan minyak dan gas bumi harus dihapuskan atau diganti dengan sistem perizinan selain itu keberadaan badan pengelola minyak dan gas bumi juga bertentangan dengan konstitusi karena sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat hubungan antara negara dan sumber daya alam minyak dan gas sepanjang dikonstruksikan dalam bentuk kontrak kerjasama dan satuan kerja khusus minyak dan gas sebagai pihak Pemerintah atau mewakili Pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud konstitusi.

Kata Kunci: Tinjauan yuridis, kontrak bagi hasil, minyak dan gas bumi.

JUDICIAL REVIEW LAW NO. 22 OF 2001 CONCERNING OIL AND GAS AGAINST IMPLEMENTATION OF PRODUCTION SHARING CONTRACT

Sugeng Susilo

Abstract

This study was conducted to determine the arrangements for the contract implementation and the results of the implementation of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas. Indonesia is one country with oil and gas are plentiful but not well managed. Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas as a legal basis the management of oil and gas has several times in the Judicial Review to the Constitutional Court related to the contract system as opposed to the constitution because the contract system will degrade the state's control of the natural resources so that the system production sharing contracts in the management of oil and gas should be abolished or replaced by a licensing system governing body other than the existence of oil and gas is also against the constitution because according to the judgment of the Constitutional Court. The method used in this thesis is a normative juridical research that refers to the legal norms contained in the legislation applicable as normative footing. The conclusion from this study is that the relationship between the state and the private sector in the management of natural resources can not be done by civil relations but will have a relationship that is public in the form of concessions or licenses were completely under the control and power of the state. Civil contract will degrade state sovereignty over natural resources. Based on this, the Constitutional Court believes the relationship between the state and natural resources of oil and gas along constructed in the form of the contract and a special unit of oil and gas as the Government or a Government representing the business entities or permanent establishment is contrary to the principle of state control referred to the constitution.

Keywords: judicial review, production sharing contracts, oil and gas.